

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN (PP) DI LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang
- a. bahwa sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu menyempurnakan tugas Pejabat Pengadaan (PP) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pengadaan (PP) Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah, dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN (PP) DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan (PP) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEDUA : Pejabat Pengadaan (PP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - d. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
  - e. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- KEDUA : Biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 Juli 2018

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH SELAKU KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN,

ttd

SALUSRA WIDYA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN (PP)  
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH.

NOMOR : 36 TAHUN 2016

TANGGAL : 9 Juli 2018

NAMA DAN JABATAN PEJABAT PENGADAAN (PP) PADA SATUAN ORGANISASI  
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Nama/NIP/Jabatan	Jabatan dalam Penugasan
1.	Tri Tarwoco, S.E. NIP. 19891125 201502 1 002 Analisis Pengelola Barang Milik Negara (BMN)	Pejabat Pengadaan pada Inspektorat
2.	Mario Duwi Cahyo, S.E. NIP. 19890323 201502 1 001 Analisis Program/Perencanaan	Pejabat Pengadaan pada Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
3.	Ikbal Amaludin, S.Pd. NIP. 19880407 201502 1 001 Analisis Kebijakan Pertama	Pejabat Pengadaan pada Biro Umum dan Keuangan
4.	Mieke Eka Putri, S.Kom. NIP. 19890725 201402 2 001 Pranata Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan pada Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
5.	Seno Haryo Wibowo, S.T. NIP. 19800924 201211 1 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
6.	Firmansyah, S.Hut. NIP. 19830130 201012 1 001 Kepala Seksi Badan Usaha	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
7.	Ria Ayuningrum, S.E. NIP. 19900920 201502 2 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional

8.	Biantri Raynasari, S.T.P. NIP. 19890608 201402 2 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
9.	Muhammad Qadr Siddiq Zam, SH. NIP. 19840621 201402 1 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
10.	Mahsa Elvina Rahmawyanet, S.ST. NIP. 19880615 201402 2 001 Pranata Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
11.	Bambang Saputra, S.T. NIP. 19820127 201502 1 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
12.	Anita Carolin, S.Sos., M.M. NIP. 19810928 201012 2 001 Kepala Seksi Kelembagaan Pengadaan	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Pengembangan Profesi
13.	Octo Army, S.T. NIP. 19811005 201012 1 001 Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Pejabat Pengadaan pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
14.	Manshur Riadli, S.Pd. NIP. 19871019 201502 1 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Sertifikasi Profesi
15.	Dian Arsita Wardhani, S.H. NIP. 19840823 201502 2 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Advokasi Penyelesaian Sangah Wilayah I
16.	Eben Henry Reagen M S, S.T. NIP. 19870515 201502 1 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Advokasi Penyelesaian Sangah Wilayah II

17.	Mira Erviana, S.T. NIP. 19900622 201211 2 001 Kepala Seksi Keterangan Ahli Pekerjaan Konstruksi	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH SELAKU KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN,

ttd

SALUSRA WIDYA